

# Percepatan Sertifikasi Halal untuk Jawa Timur

*Bersama:*

*M. Fauzi, S.Ag., M.HI.*

*Sekretaris Satgas Layanan Halal Prov. Jatim*



BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI



# Kewajiban Bersertifikat Halal

## Produk

- Masuk
- Beredar
- Diperdagangkan



Wilayah Indonesia

## **UU 33/ 2014 (JPH) Pasal 4**

**Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal**

## **Pasal 4A UU 11/ 2020 (Cipta Kerja) hal 301**

**Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.**

# Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
5. Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.
6. Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*)
7. Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal.
8. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produksi Halal, penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha

# PRINSIP SERTIFIKASI HALAL

**Memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian Proses Produksi Halal (PPH) mulai hulu sampai hilir**

**Memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram dan najis, baik fasilitas/ peralatan, pekerja, maupun lingkungan**

**Menjaga kesinambungan proses produksi halal**



# JENIS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL



**JALUR  
REGULER**

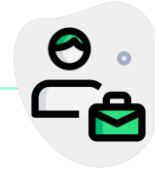
**SELF  
DECLARE**



## Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

- BPJPH melakukan penyusunan regulasi teknis untuk pendampingan PPH.
- BPJPH bekerja sama dengan ormas Islam dan Perguruan Tinggi dalam mendorong pendampingan PPH.
- Melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendampingan PPH.

### Pendampingan PPH



Ormas Islam/  
Lembaga  
Keagamaan Islam

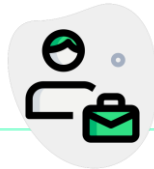


Perguruan Tinggi

Pendampingan PPH juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.



# Pendamping Proses Produk Halal (PPPH)



## Syarat Pendamping PPH

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk
- Memiliki sertifikat Pendamping PPH

## 1 Pelatihan Pendamping PPH

Bisa dilaksanakan oleh:

- a. BPJPH
- b. Ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi
- c. Instansi pemerintah atau badan usaha.

## 2 Pendataan atau registrasi

BPJPH melakukan registrasi terhadap pendamping PPH.

## 3 Pendampingan PPH

- Melakukan verifikasi dan validasi **bahan dan PPH**.
- Memberikan **rekomendasi** kepada BPJPH.

**Jml Provinsi**  
**38**  
**Jml Kab 416/ Kota 98**  
**514**  
**Jml Kecamatan**  
**7287**  
**Jml Pendamping**  
**22,208**

No	Provinsi	Jumlah Pendamping PPH
1	JAWA TIMUR	5429
2	JAWA BARAT	4209
3	JAWA TENGAH	3410
4	BANTEN	1265
5	LAMPUNG	914
6	DKI JAKARTA	879
7	SULAWESI SELATAN	763
8	SUMATRA BARAT	599



## Sertifikat Halal

1	Jawa Timur	21.001
2	Jawa Barat	17030
3	Jawa Tengah	16596
4	Lampung	10.794



## Sertifikat Halal

- BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI.
- Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik, dapat diunduh melalui aplikasi SIHalal. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 jenis produk. Jenis produk sesuai ketentuan KMA No.
- 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.



  
REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)  
جمهورية إندونيسيا  
SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)  
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat Certificate Number	رقم الشهادة
--	-------------

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :  
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

Jenis Produk Type of Product	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Bertaku sampai dengan Valid until	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
Has complied with the provision of laws and regulations  
قد استوفت أحكام التشريع

Pt.  
KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY  
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Mastuki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSSA

 Badan Sertifikasi Elektronik



BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI

#myhalalmyway  
#halalitubaik

## Label Halal Indonesia

- BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional.
- Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- Label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Ketentuan
- penggunaan label halal dan file label halal dapat diakses pada SIHalal.





# Label Halal Indonesia

- Label halal terdiri dari logo dan nomor sertifikat halal
- Warna label halal: ungu, hitam, putih
- Label halal memiliki border dan digunakan pada kemasan produk
- Warna background label halal mengikuti warna/ corak kemasan
- Format label halal dapat diunduh di aplikasi Sihalal pada akun pelaku usaha:  
Menu sertifikasi - download label halal utama/  
download label halal sekunder

Label Halal  
Utama



Label Halal Sekunder





BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI

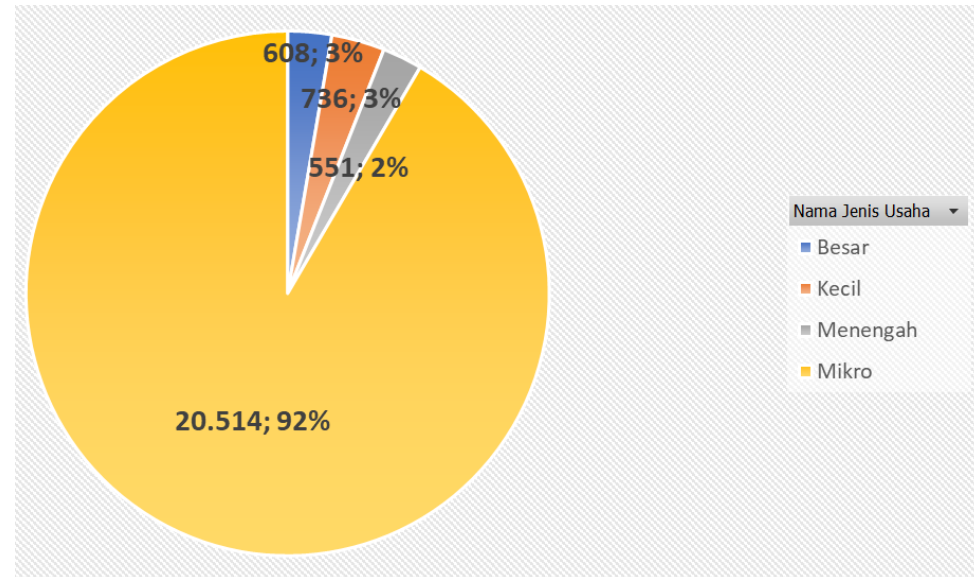
#myhalalmyway  
#halalitubaik



## PROGRESS SERTIFIKASI HALAL

**PENDAFTARAN SERTIFIKASI  
HALAL MELALUI SIHALAL  
PER 6 NOVEMBER 2022**

**22.409**



pjphkemena



alal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

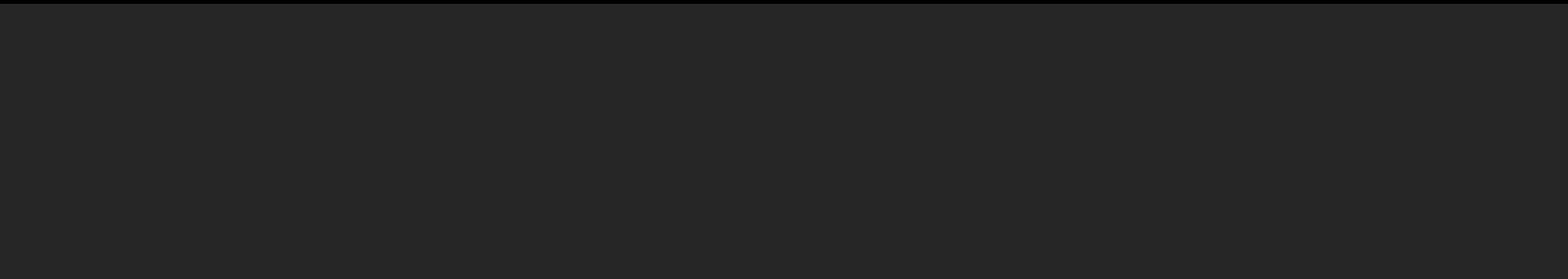
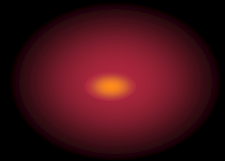
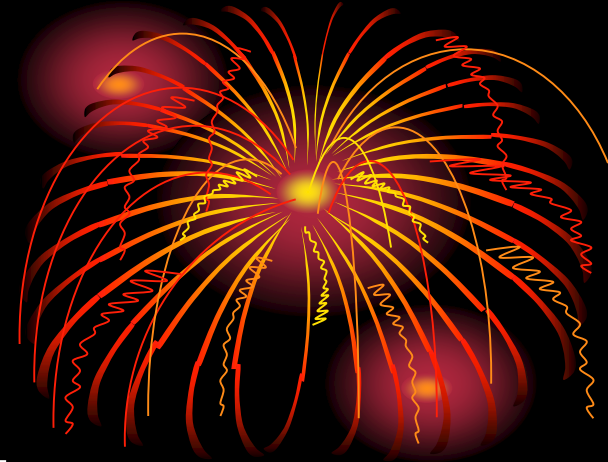
## KEBIJAKAN & UPAYA DALAM MENDORONG AKSELERASI SERTIFIKASI HALAL UMK (Self Declare)



- **Program Self Declare perlu didorong menjadi Program Nasional dan menjadi dokumen perencanaan yang dapat diikuti rencana program daerah**
- **Komitmen bersama dengan seluruh Kepala Daerah dalam program akselerasi sertifikasi halal UMK**
- **Penguatan Sistem Layanan Sertifikasi Halal berbasis digital yang mudah diakses oleh setiap pelaku usaha**
- **Mendorong sertifikasi halal UMK self declare untuk seluruh kantin di setiap madrasah**
- **Kriteria Self Declare yang perlu dirubah, agar dapat menjangkau lebih luas pelaku UMK**

# **Strategi Percepatan**

- Memaksimalkan PPPH – Upgrading**
- Meningkatkan sosialisasi Self Declare**
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait**





*SEKIAN*

*DAN SEMOGA BERMANFAAT*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته